



PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA BARAT

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaannirrohiim,

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas limpahan berkah dan rahmat Nya penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat telah dapat dirampungkan.

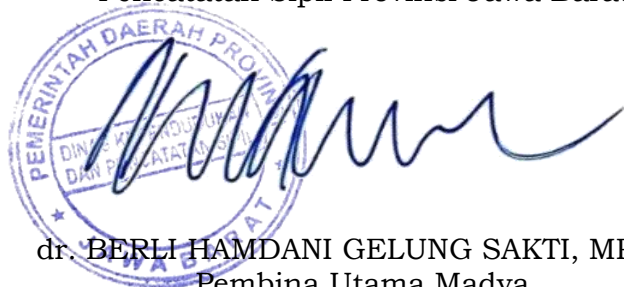
Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 disusun mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026. Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 disusun sebagai pedoman operasional bagi setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2025, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektif.

Semoga dengan tersedianya dokumen Perubahan Rencana Kerja tahun 2025, kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat lebih terarah dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab yang telah diembankan.

Kami sadari penyusunan Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 ini belumlah sempurna. Untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan untuk perbaikan dokumen Perubahan Rencana Kerja ini.

Bandung, 16 Juli 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat,



dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661020 199803 1 003

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II.....	9
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II.....	9
TAHUN 2025.....	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.....	9
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.....	25
2.4. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Tahun 2025.....	30
BAB III.....	39
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	39
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	39
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat.....	40
3.3. Program dan Kegiatan.....	42
BAB IV.....	50
PENUTUP.....	57

DAFTAR TABEL

Tabel T-II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2025	11
Tabel T-II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disdukcapil Jawa Barat.....	23
Tabel T-II.3 Isu Strategis Pembangunan Provinsi Jawa Barat	30
Tabel T-II.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.....	32
Tabel T-III.1 Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah.....	41
Tabel T-III. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), disebutkan bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien dan bersasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan nasional. Undang – Undang ini selanjutnya dijabarkan secara teknis menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Didalam peraturan ini disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja atau Renja SKPD.

Renja merupakan dokumen perencanaan SKPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Disdukcapil dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD. Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan /paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra SKPD.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat. Serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unit kerja menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan

Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap SKPD harus menyusun Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, berdasarkan hal tersebut maka disusunlah Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Tahapan dan tata cara penyusunan Perubahan Rencana Kerja terdiri dari: (1) penyusunan rancangan perubahan Renja; (2) Rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja. Penyusunan rancangan Perubahan Renja berpedoman pada rancangan perubahan RKPD tahun 2025 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Peraturan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2020;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
17. Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2024;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
24. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
25. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
26. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 74 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat;
27. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026; dan
29. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi Jawa Barat tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja tahun 2025 bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Renstra SKPD dan mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2025.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2025, adalah :

1. Tersusunnya tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, Target Capaian Kinerja, serta Pengorganisasian Program Dan Kegiatan Pelayanan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat;
2. Terwujudnya Keselarasan Perencanaan Lima Tahunan Dengan Perencanaan Tahunan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat ;

3. Terwujudnya Keselarasan Antara Dokumen Perencanaan Tahunan SKPD Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
4. Terwujudnya dasar yang kokoh bagi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2025 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

1.2. Landasan Hukum

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Menjelaskan Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Memuat sistematika penulisan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Menjelaskan realisasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan Renja Disdukcapil Provinsi

Jawa Barat Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 yang dilengkapi dengan uraian permasalahan dan rekomendasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat.

Menjelaskan analisis kinerja pelayanan organisasi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

Menjelaskan isu-isu penting terkait Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat.

2.4. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Menjelaskan faktor penghambat dan pendorong dalam melaksanakan Renja 2025.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Menjelaskan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat.

Menjelaskan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran dan target kinerja renstra.

3.3. Program dan Kegiatan.

Menjelaskan penyesuaian program dan kegiatan berdasarkan hasil rumusan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah, pengentasan kemiskinan, dll.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 259, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Provinsi.

Pelaksanaan evaluasi merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, melalui penilaian pemenuhan target program/kegiatan. Berdasarkan evaluasi dapat diketahui :

1. Faktor-faktor penyebab target kinerja program/kegiatan tidak tercapai/tidak terpenuhi/melebihi;
2. Implikasi terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab.

Evaluasi Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2025.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan capaian Renstra Perangkat Daerah dilakukan untuk mengetahui program dan kegiatan yang tidak memenuhi target dan melebihi target kinerja yang direncanakan. Dari capaian-capaian tersebut selanjutnya dilakukan analisis mengenai faktor-faktor penyebab, implikasi yang ditimbulkan dan kebijakan yang perlu diambil untuk tahun selanjutnya. Evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan capaian Renstra Disdukcapil Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Tabel T-II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Triwulan II Tahun 2025

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	73%	N/A	N/A	N/A	N/A	55%	-	-
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pengelolaan Data Layanan Pendaftaran Penduduk	12 Dokumen					12 Dokumen	6 Dokumen	50%
	Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	4 Dokumen					4 Dokumen	2 Dokumen	50%

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	1 Dokumen					1 Dokumen		
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	5 Laporan					5 Laporan	2	40%
	Sub Kegiatan Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk	5 Laporan					5 Laporan	2 Laporan	40%
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	99,90%					92,00%		

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	5 Laporan					5 Laporan	3 Laporan	60%
	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	5 Laporan					5 Laporan	2 Laporan	40%
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data yang dimanfaatkan	100%					100,00%		
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data dan Informasi yang ditindaklanjuti	1 Dokumen					1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	4 Dokumen					4 Dokumen	2 Dokumen	50%

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan Penduduk yang Disusun	7 Dokumen					7 Dokumen	2	28,57%
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Laporan Kab/Kota yang terbina dan terawasi sesuai ketentuan	12 Laporan					12 Laporan	6 Laporan	50%
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan	12 Laporan					12 Laporan	6 Laporan	50%
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi	54 Orang					54 Orang		

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Dokumen Kependudukan Yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban Opd Berdasarkan Permendagri	100%					100%		
	Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Kependudukan	3 Dokumen					3 Dokumen	1 Dokumen	33,33%
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	3 Dokumen					3 Dokumen	1 Dokumen	33,33%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi	85%					80%		
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	92%					88,50%		

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang sesuai dengan ketentuan	10 Dokumen					10 Dokumen		
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen					7 Dokumen	3 Dokumen	42,86%
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan					3 Laporan	1 laporan	33,33%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	3 Laporan					3 Laporan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/Bulan					59 Orang/Bulan	59 orang	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17 Laporan					17 Laporan	8 Laporan	47,06%

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	20 Orang					20 Orang		
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang					20 Orang		
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	1 Laporan					1 Laporan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket					2 Paket	1 Paket	50%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket					8 Paket		
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket					2 Paket	1 paket	50%

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket					7 Paket	4 Paket	57,14%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan					12 Laporan	6 Laporan	50%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, Listrik, Jasa Keamanan dan kebersihan	1 Laporan					1 Laporan		
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan					12 Laporan	6 Laporan	50%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan					12 Laporan	6 laporan	50%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	50 Unit							

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket					7 Paket	-	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit					126 Unit	60 Unit	65,93%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	27 Unit					27 Unit	27 Unit	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit					4 Unit	4 Unit	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit					23 Unit	23 Unit	100%

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Renstra Tahun 2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023 (tahun n-3)	Target dan realisasi kinerja program dan keluaran kegiatan OPD tahun 2024 (tahun lalu /n-2)			Target program / kegiatan Renja OPD tahun berjalan tahun 2025 (tahun n-1)	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra OPD s/d dengan tahun 2025 (tahun berjalan/n-1)	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Triwulan II tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)*	11=(10/4)*
	Dinas Operasional atau Lapangan									
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94 Unit					94 Unit	94 Unit	100%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit					0 Unit		
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit					0 Unit		

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Realisasi Kinerja Program yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Provinsi Jawa Barat sebanyak 5 Program s.d Bulan Juni Tahun 2025, yaitu: Program Pendaftaran Penduduk sebesar 98,99%, Program Pencatatan Sipil sebesar 93,76%, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sebesar 86,48%, Program Pengelolaan Profil Kependudukan sebesar 33,33%, dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar 52,35%.
- Penyebab tercapainya target kinerja Program dan Kegiatan pada Disdukcapil Provinsi Jawa Barat adalah adanya komitmen Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; berkomitmen membangun zona integritas, berkolaborasi dengan stakeholder untuk pencapaian cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan.
- Pada tahun 2025 Indikator Kinerja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat mengalami perubahan dari periode sebelumnya karena adanya penyesuaian periode perencanaan yaitu Renstra 2025-2029, sehingga dilakukan penyesuaian indikator berdasarkan kondisi actual. Oleh karena itu, target dan realisasi indikator pada tahun 2023-2024 tidak dapat dihitung.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Disdukcapil Provinsi Jawa Barat

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan. Untuk menganalisis kinerja pelayanan atau tingkat capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, digunakan beberapa indikator antara lain :

1. Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota

2. Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota
3. Persentase Data yang Dimanfaatkan
4. Persentase Dokumen Kependudukan yang Dihasilkan sesuai Kewajiban OPD Berdasarkan Permendagri

Hasil analisis menunjukkan bahwa Tingkat Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sampai dengan Tahun berjalan 2025 hasilnya dapat dilihat sebagaimana Tabel T-II.2

Tabel T-II.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah								Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	Tahun 2027 (n+2)	Tahun 2028 (n+3)	Tahun 2029 (n+4)	Tahun 2030 (n+5)	Tahun 2023 (n-2)	Tahun 2024 (n-1)	Tahun 2025 (n)	Tahun 2026 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)					(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase Kinerja Administrasi Kependudukan di Jawa Barat	-	-	NA	88,55%	89,05%	89,55%	NA	NA	NA	NA	NA	94,26	Belum Rilis	-	IKU
	Persentase Kepemilikan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat	-	-	NA	NA	73,5%	77%	79%	82%	84,9%	86,45%	NA	71,15%	-	-	Perubahan IKU
2	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	-	-	NA	97,89%	55%	57%	60%	65%	70%	73%	NA	54,02%	-	-	IKP 2025 Perubahan Metadata

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

4	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	-	-	NA	99%	92%	97%	98%	99%	99,8%	99,9%	NA	93,95%	-	-	IKP 2025 Perubahan Metadata
5	Persentase Data yang Dimanfaatkan	-	-	NA	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	NA	83,78%	-	-	IKP 2025 Perubahan Metadata
6	Persentase Dokumen Kependudukan yang Dihasilkan sesuai Kewajiban OPD Berdasarkan Permendagri	-	-	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	IKP 2025 Perubahan Metadata

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dimaksudkan untuk menentukan permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan kependudukan dan pencatatan sipil adalah bahwa dinamika pembangunan daerah yang bergerak cepat dengan adanya perkembangan global diberbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari, dampak diantaranya adalah pertumbuhan dan mobilitas penduduk yang semakin tinggi, yang tentunya memerlukan pelayanan dalam bidang Keadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lebih cepat dan akurat, Perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi *Strength* (Kekuatan) dan *Weaknesses* (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi *Oppurtunity* (Peluang) dan Ancaman *Threaths* (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

- 1) Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat sebagai dinas Tipe C yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

- 2) Kualifikasi Pendidikan ASN di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang cukup tinggi, di tingkatan Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2) mencapai 23 Orang dari total ASN yang berjumlah 35 Orang;
- 3) Sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai sebuah PD Provinsi Jawa Barat terutama Server data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Provinsi yang semakin baik
- 4) Keleluasaan menentukan besaran anggaran untuk kegiatan perencanaan yang diberikan oleh kepala daerah;

KELEMAHAN (W) :

- 1) Kemampuan sumber daya manusia perencanaan dan pelaksana teknis yang tidak merata;
- 2) Kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang sangat terbatas yaitu hanya penyusunan profil kependudukan;
- 3) Sumber data hasil capaian pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang kurang lengkap sehingga berpengaruh dalam proses penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
- 4) Masih lemahnya koordinasi di internal PD juga lintas Perangkat Daerah, juga dengan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Ormas, dll ;
- 5) Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, baik metodologi, pelaksanaan maupun penggunaannya;
- 6) Belum konsistennya antara Perencanaan dan realisasi kegiatan.

2. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

- 1) UU nomor 25 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 2) Jumlah Penduduk Jawa Barat yang terbesar di Indonesia;
- 3) Keinginan masyarakat untuk memiliki dokumen administrasi kependudukan yang tinggi;

- 4) Apresiasi dari pimpinan daerah, DPRD, dan perangkat daerah lainnya yang cukup baik tentang keberadaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, terutama akan ketersediaan data kependudukan yang *up to date*;
- 5) Kepercayaan pimpinan daerah, DPRD dan PD serta Lembaga dan Organisasi di lingkup Provinsi terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

ANCAMAN (T):

- 1) Luas wilayah yang besar, dan masih adanya anggapan dari masyarakat bahwa akta catatan sipil dan dokumen administrasi kependudukan tidak begitu penting;
- 2) Penduduk yang masuk dan selanjutnya berdomisili di wilayah Jawa Barat tanpa dilengkapi dokumen kependudukan yang sah.

Berdasarkan kajian hasil evaluasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, khususnya pada kinerja pelayanan Administrasi Kependudukan selama ini, dapat diidentifikasi isu-isu penting sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan SIAK terpusat dalam rangka mewujudkan layanan Administrasi Kependuduk Digital dalam genggaman;
2. Konsolidasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara nasional dalam rangka pelayanan membahagiakan masyarakat;
3. Dukungan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem;

Dengan memperhatikan dinamika penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, berdasarkan isi-isu penting tersebut telah dirumuskan isu-isu strategis yang perlu ditangani, dan kemudian menjadi prioritas langkah maupun kebijakan yang diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Penyelenggaraan SIAK terpusat dalam rangka mewujudkan layanan Administrasi Kependuduk Digital dalam genggaman
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi mengkoordinir dan memfasilitasi kabupaten/kota yang akan menerapkan SIAK terpusat;
 - b. Seluruh Kabupaten/Kota siap melaksanakan SIAK terpusat Tahun 2023;

- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi memfasilitasi Kabupaten/Kota melatih dan menyediakan petugas Administrator Database Kependudukan (ADB) untuk dijadikan sebagai super user SIAK terpusat;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi memfasilitasi Kabupaten/Kota menyiapkan para operator SIAK yang akan dilatih Tim Teknis.
2. Konsolidasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara nasional dalam rangka pelayanan membahagiakan masyarakat
- a. Dengan budaya kerja dan semangat “Dukcapil BISA” memaknai bahwa Berkarya, Inisiatif/Inovatif, Sabar, Amanah/Adaptif harus terus dibangun, sebagai passion dalam pelayanan yang membahagiakan masyarakat;
 - b. Penerbitan Identitas Kependudukan merupakan hulu dari pelayanan administrasi kependudukan melalui NIK bagi Penduduk;
 - c. Evaluasi terhadap layanan Dukcapil dalam penambahan indikator terkait penerapan buku pokok pemakaman/pelaporan kematian dari desa/kelurahan dengan target minimal 10 per kabupaten/kota;
 - d. Merealisasikan pencapaian target nasional kepemilikan dokumen kependudukan, meliputi perekaman KTP-el, kepemilikan KIA, cakupan kepemilikan akta kelahiran anak dan cakupan akta kematian, akta perkawinan dan akta perceraian;
 - e. Meningkatkan pemanfaatan data kependudukan, dengan prioritas semua OPD secara aktif mengakses NIK sebagai kunci akses dalam pelayanan publik. Akses data dilakukan dengan memperhatikan keamanan data sesuai peraturan perundang-undangan;
 - f. Berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan mewujudkan layanan Adminduk, digital dalam genggaman;
 - g. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang lebih cepat dan berkualitas, melakukan branding baru layanan Dukcapil dengan langkah-langkah antara lain: melakukan sosialisasi Single Identity Berbasis Nomor Induk Kependudukan, mewujudkan pelayanan yang cepat/tidak membiarkan penundaan berlarut dalam pelayanan, aktif melakukan komunikasi interaksi dengan masyarakat.

3. Dukungan data Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
 - a. Sinkronisasi data Kependudukan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
 - b. Melaksanakan koordinasi, evaluasi terkait Data Kependudukan.
4. Dukungan Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pilkada serentak Tahun 2024
 - a. Koordinasi Sinkronisasi data penduduk dan data pemilih akan dilakukan secara terpusat sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak perlu menyerahkan data penduduk by name by address kepada KPUD;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota menuntaskan perekaman KTP-el termasuk mulai melakukan perekaman terhadap pemilih pemula tahun 2025 melalui perekaman jemput bola ke sekolah-sekolah dan tempat lain yang membutuhkan;
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota meningkatkan kualitas data kependudukan.

Tabel T-II.3 Isu Strategis Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Arah Kebijakan RKP 2025	Isu Strategis RPJMD Jabar 2025-2029	Permasalahan Pembangunan Tahun 2025	Isu Strategis Pembangunan Jawa Barat Tahun 2025
Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Produktif	Kualitas Tata Kelola Pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah serta budaya birokrasi dengan ASN yang Profesional 2. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik 	Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

2.4. Permasalahan dan Penyelesaian Masalah dalam Pelaksanaan Hasil Renja Tahun 2025

Review terhadap Perubahan RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan rencana program prioritas dan pagu indikatif yang berdasarkan Rancangan Awal RKPD. *Review* terhadap Perubahan RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Dari analisis kebutuhan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat.

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 semua telah dirancang memenuhi indikator sasaran yang terdapat pada rancangan awal RKPD. Namun terdapat banyak kegiatan yang belum terpenuhi pagu anggarannya dikarenakan terkena pemangkasan hasil dari pagu indikatif yang diterima.

Tabel T-II.4 *Reviu* terhadap Perubahan RKPD Tahun 2025

Nama OPD : Disdukcapil Provinsi Jawa Barat

No	Rancangan Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Tar get capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pendaftaran Penduduk	Jawa Barat	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	55%	1.540.729.770	Program Pendaftaran Penduduk	Jawa Barat	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	55%	1.540.729.770	
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jawa Barat		27 Kab/Kota	82.630.000	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jawa Barat		27 Kab/Kota	82.630.000	
	Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	4 Dokumen	82.630.000	Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	4 Dokumen	82.630.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jawa Barat		27 Kab/Kota	1.458.099.770	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jawa Barat		27 Kab/Kota	1.458.099.770	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jawa Barat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	5 Laporan	1.458.099.770	Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jawa Barat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	5 Laporan	1.458.099.770	
	Program Pencatatan Sipil	Jawa Barat	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	92,00%	228.194.256	Program Pencatatan Sipil	Jawa Barat	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	92,00%	228.194.256	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jawa Barat		27 Kab/Kota	228.194.256	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jawa Barat		27 Kab/Kota	228.194.256	

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jawa Barat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	5 Laporan	228.194.256	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jawa Barat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	5 Laporan	228.194.256	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jawa Barat	Persentase Data yang dimanfaatkan	100,00%	253.206.118	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jawa Barat	Persentase Data yang dimanfaatkan	100,00%	253.206.118	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data dan Informasi yang ditindaklanjuti	5 Dokumen	31.074.696	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data dan Informasi yang ditindaklanjuti	5 Dokumen	31.074.696	
	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jawa Barat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	4 Dokumen	12.699.696	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jawa Barat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	4 Dokumen	12.699.696	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan Penduduk yang Disusun	1 Dokumen	18.375.000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan Penduduk yang Disusun	1 Dokumen	18.375.000	
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jawa Barat		27 Kab/Kota	222.131.422	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jawa Barat		27 Kab/Kota	222.131.422	
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan	Jawa Barat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan	12 Laporan	198.731.422	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan	Jawa Barat	Jumlah Laporan Hasil	12 Laporan	198.731.422	

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

	terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Pengawasan			terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Pembinaan dan Pengawasan			
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jawa Barat	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi	54 Orang	23.400.000	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jawa Barat	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi	54 Orang	23.400.000	
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jawa Barat	Persentase Dokumen Kependudukan Yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban Opd Berdasarkan Permendagri	100%	13.725.000	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jawa Barat	Persentase Dokumen Kependudukan Yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban Opd Berdasarkan Permendagri	100%	13.725.000	
	Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Kependudukan	3 Dokumen	13.725.000	Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Kependudukan	3 Dokumen	13.725.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	3 Dokumen	13.725.000	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jawa Barat	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	3 Dokumen	13.725.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kota Bandung	Indeks Reformasi Birokrasi	80%	12.987.185.354	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Kota Bandung	Indeks Reformasi Birokrasi	80%	12.987.185.354	

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

		Kota Bandung	Nilai Sakip Perangkat Daerah	88,50%			Kota Bandung	Nilai Sakip Perangkat Daerah	88,50%		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung		10 Dokumen	36.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung		10 Dokumen	36.000.000	
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	21.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bandung	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	21.000.000	
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	15.000.000	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	15.000.000	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bandung	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	3 Laporan	10.101.653.617	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bandung	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	3 Laporan	10.101.653.617	
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/Bulan	10.092.653.617	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang/Bulan	10.092.653.617	
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17 Laporan	9.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Bandung	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	17 Laporan	9.000.000	
	Kegiatan Administrasi	Kota Bandung	Jumlah Pegawai yang mengikuti	20 Orang	37.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian	Kota Bandung	Jumlah Pegawai yang mengikuti	20 Orang	37.000.000	

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Kepegawaian Perangkat Daerah		pengembangan kompetensi			Perangkat Daerah		pengembangan kompetensi			
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bandung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	37.000.000	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Bandung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20 Orang	37.000.000	
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandung	Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	1 Laporan	704.488.548	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bandung	Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	1 Laporan	704.488.548	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	128.365.110	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bandung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	128.365.110	
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	63.180.425	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bandung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket	63.180.425	
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	35.007.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bandung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	35.007.000	
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bandung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	119.220.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bandung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	119.220.000	
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	358.716.013	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bandung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	358.716.013	

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandung	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, Listrik, Jasa Keamanan dan kebersihan	1 Laporan	1.510.105.689	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bandung	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, Listrik, Jasa Keamanan dan kebersihan	1 Laporan	1.510.105.689	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	105.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	105.000.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.405.105.689	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bandung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1.405.105.689	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandung	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	1 Laporan	326.051.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Bandung	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	1 Laporan	326.051.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	73.080.000	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Kota Bandung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket	73.080.000	
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bandung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	91 Unit	252.971.000	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bandung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	91 Unit	252.971.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	Kota Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana	27 Unit	271.886.500	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik	Kota Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana	27 Unit	271.886.500	

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

	Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		dalam Kondisi Baik			Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		dalam Kondisi Baik			
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	97.820.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Bandung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	4 Unit	97.820.000	
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	111.162.500	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bandung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit	111.162.500	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	62.904.000	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Bandung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	94 Unit	62.904.000	
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	0 Unit	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	0 Unit	0	Efisiensi Anggaran

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0 Unit	0	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			0 Unit	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bandung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Efisiensi Anggaran
Jumlah					15.023.040.498					15.023.040.498	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Indonesia merupakan Negara urutan keempat di dunia dengan besaran jumlah penduduk setelah China, India dan Amerika Serikat. Pada Tahun 2010 jumlah penduduk Indonesia sebesar 238,5 juta orang, sedangkan pada Tahun 2015 dan 2020 sebanyak 255,5 juta orang dan 271,1 juta orang, menurut data Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 . Dengan kondisi jumlah penduduk yang sedemikian besar ini, maka penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, tertib Dokumen Kependudukan sebagaimana Program Nasional periode yang lalu merupakan suatu keniscayaan yang harus dilaksanakan. Hal tersebut harus dilakukan agar pembangunan yang pada dasarnya obyek dan subyeknya adalah penduduk, dapat dikelola dengan perencanaan yang baik. Prioritas Pembangunan dalam menangani Urusan Kependudukan yang disebutkan dalam Agenda Nasional RPJM Tahun 2015-2020 adalah “Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Data serta Informasi Kependudukan”. Dari Prioritas tersebut, Sasaran yang ingin dicapai adalah “meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan informasi kependudukan tersebut untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan”. Dalam rangka mencapai Sasaran tersebut, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditempuh adalah peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu untuk Renja Disdukcapil Tahun 2016 dijadikan basis dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat dan sekaligus pengembangan kebijakan dan program pembangunan, antara lain melalui : a. Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu; b. Peningkatan sosialisasi pentingnya dokumen bukti kewarganegaraan bagi seluruh penduduk; c. Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan bagi pemangku kebijakan untuk perencanaan pembangunan; dan d. Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan

Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tabel T-III.1 Sinergi Pembangunan Pusat dan Daerah

Pusat		Provinsi	
Sasaran	Indikator	Sasaran	Indikator
Meningkatnya Kualitas Layanan Pemenuhan Dokumen Kependudukan serta Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Teknologi	Indeks Kualitas Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Kepemilikan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat	Persentase Kepemilikan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota di Jawa Barat

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat

Upaya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat dilaksanakan melalui 6 (enam) prioritas pembangunan daerah. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran pembangunan, prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan untuk tahun 2024 merupakan prioritas pembangunan daerah yang tertuang pada RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Dalam hal ini, prioritas pembangunan daerah disusun berdasarkan arah kebijakan RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pembangunan, serta memuat Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk tahun 2024.

Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu 1) Tematik (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan); 2) Holistik (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir; 3) Integratif (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota); dan 4) Spasial (mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan).

Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 meliputi:

1. Prioritas 1, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata;

2. Prioritas 2, yaitu Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama;
3. Prioritas 3, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;
4. Prioritas 4, yaitu Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
5. Prioritas 5, yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa;
6. Prioritas 6, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

Dalam hal ini Prioritas 6 menjadi tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra 2024 - 2026. Sebagaimana bunyi Pasal 86 Permendagri nomor 54 Tahun 2010. Tujuan SKPD berupa pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani Isu-Isu Strategis Daerah yang dihadapi. Tujuan organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi, yang mengandung makna:

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir Rencana Strategis (Renstra);
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu rencana strategis.

Berdasarkan arahan makna penetapan Tujuan Organisasi dan uraian tersebut di atas, maka dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat menetapkan Tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Terciptanya kualitas dan kuantitas layanan informasi data kependudukan skala Provinsi;
3. Tersedianya layanan informasi data kependudukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu Tujuan, yang diformulasikan secara spesifik, terukur, relevan/rasional dan dapat dicapai

atau dilaksanakan. Sasaran dapat berupa hasil dari suatu program atau keluaran dari suatu kegiatan. Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, adalah sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang optimal;
2. Terpenuhinya informasi data kependudukan dan pencatatan sipil di Jawa Barat;
3. Tersedianya konten data kependudukan sesuai kebutuhan perangkat daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

Program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD, selanjutnya dijabarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Rencana pelaksanaan program-program yang akan diwujudkan pada tahun 2025 sebanyak 5 Program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
2. Program Pencatatan Sipil
3. Program Pendaftaran Penduduk
4. Program Pengelolaan Profil Kependudukan
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sedangkan pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel T-III. 2 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Perubahan Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	Jawa Barat	55%	1.540.729.770	APBD	57%	98,89%	700.000.000
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jawa Barat	27 Kab/Kota	82.630.000	APBD		27 Kab/Kota	250.000.000
	Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jawa Barat	4 Dokumen	82.630.000	APBD		4 Dokumen	250.000.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		Jawa Barat	27 Kab/Kota	1.458.099.770	APBD		27 Kab/Kota	100.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jawa Barat	5 Laporan	1.458.099.770	APBD	Kemiskinan Ekstrim	5 Laporan	100.000.000
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	Jawa Barat	92,00%	228.194.256	APBD		99,05%	350.000.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		Jawa Barat	27 Kab/Kota	228.194.256	APBD		27 Kab/Kota	2000.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Jawa Barat	5 Laporan	228.194.256	APBD	Kemiskinan Ekstrim	5 Laporan	2000.000.000

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data yang dimanfaatkan	Jawa Barat	100,00%	253.206.118	APBD		83,78%	800.000.000
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data dan Informasi yang ditindaklanjuti	Jawa Barat	5 Dokumen	31.074.696	APBD		31 Dokumen	250.000.000
	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jawa Barat	4 Dokumen	12.699.696	APBD	Kemiskinan Ekstrim	4 Dokumen	140.000.000
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan Penduduk yang Disusun	Jawa Barat	1 Dokumen	18.375.000	APBD	Kemiskinan Ekstrim	1 Dokumen	140.000.000
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Jawa Barat	27 Kab/Kota	222.131.422	APBD		27 Kab/Kota	320.000.000
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan	Jawa Barat	12 Laporan	198.731.422	APBD	Kemiskinan Ekstrim	12 Laporan	220.000.000
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi	Jawa Barat	54 Orang	23.400.000	APBD	Kemiskinan Ekstrim	54 Orang	100.000.000
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Dokumen Kependudukan Yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban	Jawa Barat	100%	13.725.000	APBD		100%	100.000.000

		Opd Berdasarkan Permendagri							
	Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Kependudukan	Jawa Barat	3 Dokumen	13.725.000	APBD		3 Dokumen	100.000.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Jawa Barat	3 Dokumen	13.725.000	APBD	Kemiskinan Ekstrim	3 Dokumen	100.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi	Kota Bandung	80%	12.987.185.354	APBD		66,65%	17.281.968.700
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kota Bandung	88,50%				81,25%	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Bandung	10 Dokumen	36.000.000	APBD		10 Dokumen	141.000.000
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bandung	7 Dokumen	21.000.000	APBD		4 Dokumen	50.000.000
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung	3 Laporan	15.000.000	APBD		1 Dokumen	65.000.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Kota Bandung	3 Laporan	10.101.653.617	APBD		3 Laporan	11.235.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung	59 Orang/Bulan	10.092.653.617	APBD		60 Orang/Bulan	10.779.443.630

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bandung	17 Laporan	9.000.000	APBD		17 Laporan	30.000.000
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	Kota Bandung	20 Orang	37.000.000	APBD		20 Orang	30.000.000
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bandung	20 Orang	37.000.000	APBD		20 Orang	30.000.000
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Kota Bandung	1 Laporan	704.488.548	APBD		1 Laporan	1.465.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bandung	3 Paket	128.365.110	APBD		3 Paket	75.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bandung	8 Paket	63.180.425	APBD		8 Paket	50.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bandung	2 Paket	35.007.000	APBD		2 Paket	40.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bandung	7 Paket	119.220.000	APBD		7 Paket	150.000.000
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bandung	12 Laporan	358.716.013	APBD		12 Laporan	1.150.000.000

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, Listrik, Jasa Keamanan dan kebersihan	Kota Bandung	1 Laporan	1.510.105.689	APBD		1 Laporan	1.475.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bandung	12 Laporan	105.000.000	APBD		12 Laporan	125.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bandung	12 Laporan	1.405.105.689	APBD		12 Laporan	1.350.000.000
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	Kota Bandung	1 Laporan	326.051.000	APBD		1 Laporan	200.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Bandung	7 Paket	73.080.000	APBD		2 Paket	100.000.000
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bandung	91 Unit	252.971.000	APBD		7 Unit	100.000.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	Kota Bandung	27 Unit	271.886.500	APBD		27 Unit	200.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Bandung	4 Unit	97.820.000	APBD		4 Unit	110.000.000

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bandung	23 Unit	111.162.500	APBD		23 Unit	115.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bandung	94 Unit	62.904.000	APBD		75 Unit	48.986.991
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bandung	0 Unit	0	APBD	Efisiensi Anggaran	1 Unit	500.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bandung	0 Unit	0	APBD	Efisiensi Anggaran	1 Unit	0
Jumlah Pagu Indikatif					15.023.040.498				19.081.968.700

3.3.1 Rencana Penyesuaian Program dan Kegiatan dalam Perubahan Renja Tahun 2025

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, dilakukan penyesuaian dalam perubahan kebijakan anggaran Perangkat Daerah. Berikut disajikan tabel penyesuaian program dan kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2025 yang didasarkan pada hasil input Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan		Selisih
				Target	Pagu Anggaran (Rp.)	Target	Pagu Anggaran (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Kab/Kota	Jawa Barat	98,39%	350.000.000	55%	1.540.729.770	1.190.729.770
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pengelolaan Data Layanan Pendaftaran Penduduk	Jawa Barat	12 Dokumen	250.000.000	12 Dokumen	82.630.000	(167.370.000)
	Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jawa Barat	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	82.630.000	(167.370.000)
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Pelayanan Pendaftaran dan Dokumen Kependudukan yang diterbitkan	Jawa Barat	5 Laporan	100.000.000	5 Laporan	1.458.099.770	1.358.099.770
	Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jawa Barat	5 Laporan	100.000.000	5 Laporan	1.458.099.770	1.358.099.770
	Program Pencatatan Sipil	Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Kab/Kota	Jawa Barat	99,05%	250.000.000	92,00%	228.194.256	(24.805.744)
	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Jumlah Pelayanan Dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan	Jawa Barat	5 Laporan	250.000.000	5 Laporan	228.194.256	(24.805.744)
	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Jawa Barat	5 Laporan	250.000.000	5 Laporan	228.194.256	(24.805.744)
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Data yang dimanfaatkan	Jawa Barat	83,78%	600.000.000	100,00%	253.206.118	(346.793.882)
	Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan	Jawa Barat	1 Dokumen	280.000.000	1 Dokumen	31.074.696	(248.925.304)

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

	Administrasi Kependudukan Provinsi	Data dan Informasi yang ditindaklanjuti						
	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jawa Barat	4 Dokumen	140.000.000	4 Dokumen	12.699.696	(127.300.304)
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan Penduduk yang Disusun	Jawa Barat	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	18.375.000	(121.625.000)
	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Laporan Kab/Kota yang terbina dan terawasi sesuai ketentuan	Jawa Barat	12 Laporan	320.000.000	12 Laporan	222.131.422	(97.868.578)
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan	Jawa Barat	27 Kab/Kota	220.000.000	27 Kab/Kota	198.731.422	(21.268.578)
	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi	Jawa Barat	12 Laporan	100.000.000	12 Laporan	23.400.000	(76.600.000)
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Dokumen Kependudukan Yang Dihasilkan Sesuai Kewajiban Opd Berdasarkan Permendagri	Jawa Barat	54 Orang	100.000.000	54 Orang	13.725.000	(86.275.000)
	Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah Dokumen Agregat dan Profil Kependudukan	Jawa Barat	100%	100.000.000	100%	13.725.000	(86.275.000)
	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain	Jawa Barat	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	13.725.000	(86.275.000)

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Reformasi Birokrasi	Jawa Barat	66,65%	14.501.640.608	80%	12.987.185.354	(1.514.455.254)
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kota Bandung	81,25%		90,50%		
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Kota Bandung	10 Dokumen	130.300.000	10 Dokumen	36.000.000	(94.300.000)
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bandung	7 Dokumen	70.000.000	7 Dokumen	21.000.000	(49.000.000)
	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bandung	3 Laporan	50.000.000	3 Laporan	15.000.000	(35.000.000)
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	Kota Bandung	3 Laporan	10.122.653.617	3 Laporan	10.101.653.617	(21.000.000)
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bandung	59 Orang/Bulan	10.092.653.617	59 Orang/Bulan	10.092.653.617	-
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Bandung	17 Laporan	30.000.000	17 Laporan	9.000.000	(21.000.000)
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	Kota Bandung	20 Orang	40.000.000	20 Orang	37.000.000	(3.000.000)
	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bandung	20 Orang	40.000.000	20 Orang	37.000.000	(3.000.000)
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Kebutuhan Sarana dan Prasarana yang terpenuhi	Kota Bandung	1 Laporan	1.699.427.442	1 Laporan	704.488.548	(3.000.000)

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bandung	3 Paket	64.160.315	3 Paket	128.365.110	64.204.795
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bandung	8 Paket	157.475.074	8 Paket	63.180.425	(94.294.649)
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bandung	2 Paket	32.019.000	2 Paket	35.007.000	2.988.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bandung	7 Paket	163.325.480	7 Paket	119.220.000	(44.105.480)
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bandung	12 Laporan	1.282.447.573	12 Laporan	358.716.013	(923.731.560)
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kerja yang terpenuhi kebutuhan jasa komunikasi, sumber daya air, Listrik, Jasa Keamanan dan kebersihan	Kota Bandung	1 Laporan	1.522.076.889	1 Laporan	1.510.105.689	(11.971.200)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bandung	12 Laporan	105.000.000	12 Laporan	105.000.000	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bandung	12 Laporan	1.417.076.889	12 Laporan	1.405.105.689	(11.971.200)
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terpenuhi	Kota Bandung	1 Laporan	459.108.960	1 Laporan	326.051.000	(133.057.960)

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Bandung	7 Paket	127.937.960	1 Paket	73.080.000	(54.857.960)
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Bandung	91 Unit	331.171.000	85 Unit	252.971.000	(78.200.000)
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik	Kota Bandung	27 Unit	528.073.700	27 Unit	271.886.500	(256.187.200)
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kota Bandung	4 Unit	97.820.000	4 Unit	97.820.000	-
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bandung	23 Unit	111.162.500	23 Unit	111.162.500	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Bandung	94 Unit	62.904.000	94 Unit	62.904.000	-
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bandung	1 Unit	256.187.200	0 Unit	0	(256.187.200)
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bandung	0 Unit	0	0 Unit	0	-

Perubahan Renja Disdukcapil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Jumlah Pagu Indikatif			15.901.640.608		15.023.040.498	(878.600.110)
------------------------------	--	--	-----------------------	--	-----------------------	----------------------

Berdasarkan rekapitulasi tabel di atas, terdapat penyesuaian anggaran pada Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 semula Rp. 15.901.640.608,- menjadi Rp. 15.023.040.498,-. Terdapat penyesuaian anggaran sebesar Rp. 878.600.100,- pada Program Pendaftaran Penduduk terdapat alokasi tambahan belanja Hibah Pengadaan Blangko KTP el sebesar **Rp. 1.406.618.950,-** yang digunakan untuk menyelesaikan data wajib KTP yang berstatus *Print Ready Record* (PRR) dan penyediaan kebutuhan untuk perubahan element data (hilang, rusak, berubah status, dll) dalam rangka peningkatan cakupan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan di Jawa Barat.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun.

Rencana Kerja Perubahan memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat, juga implementasi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat. Perubahan Renja tahun 2025 disusun sebagai perencanaan operasional tahunan pembangunan bidang Administrasi Kependudukan di Jawa Barat untuk tahun 2025.

Dengan mengintegrasikan berbagai sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renja Perubahan tahun 2025 juga diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat maupun di lingkup daerah. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja tahunan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 sangat bergantung pada komitmen penyelenggara sendiri. Untuk itu Rencana Kerja Perubahan tahun 2025 ini agar menjadi pedoman bagi penyelenggara di lingkungan Disdukcapil selama kurun waktu satu tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat tahun 2025 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mendukung pencapaian Visi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bandung, 16 Juli 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat,



dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661020 199803 1 003